

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari seberapa besar dan signifikan pengaruh dari faktor-faktor tertentu terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 yang merupakan salah satu pilar terbesar dari pendapatan asli daerah. Adapun faktor-faktor yang dimaksudkan adalah faktor jumlah penduduk, faktor jumlah belanja modal dan faktor besaran indeks kemahalan konstruksi. Jumlah penduduk dan indeks kemahalan konstruksi yang diteliti pada penelitian ini adalah jumlah penduduk dan indeks kemahalan konstruksi pada tahun yang sama dengan penerimaan PBB-P2 yang diteliti. Sementara, belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal pada 2 tahun sebelum tahun penerimaan PBB-P2 yang diteliti. Hasil dari analisis penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Penelitian dilakukan pada 81 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mulai melakukan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013. Fokus tahun penelitian adalah sejak tahun pengalihan atau tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa:

1. Variabel jumlah penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan pertambahan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2 di 81 daerah objek

penelitian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan tempat tinggal berarti meningkat, peningkatan kebutuhan tempat tinggal akan meningkatkan nilai objek PBB-P2 peningkatan penerimaan PBB-P2. Kesimpulannya, faktor jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 untuk itu pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terkait hal ini.

2. Hasil pengujian terhadap objek dan data yang sama menunjukkan bahwa variabel belanja modal (t-2) secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah mendorong terjadinya pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan yang terjadi akan mendorong pertambahan objek pajak bumi dan bangunan, serta meningkatkan nilai tanah dan bangunan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan PBB-P2. Kenaikan belanja modal ditahun a memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 di tahun $a+2$. Kesimpulannya, faktor belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 untuk itu pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terkait hal ini.
3. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel indeks kemahalan konstruksi (IKK) memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB-P2. Meningkatnya harga konstruksi / nilai suatu bangunan di daerah tertentu memberikan dampak yang sama baik kepada peningkatan besaran indeks kemahalan konstruksi daerah tersebut maupun terhadap peningkatan dasar perhitungan pengenaan PBB-P2 yang berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2. Kesimpulannya, faktor IKK memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 untuk itu pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terkait hal ini.
4. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa secara bersama-sama, variabel jumlah penduduk, variabel belanja modal, dan variabel IKK memiliki pengaruh terhadap variabel penerimaan PBB-P2. Hal ini menyebabkan, bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya jumlah belanja modal dan bertambahnya besaran variabel IKK akan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan PBB-

P2. Kesimpulannya, dengan berpengaruhnya variabel-variabel ini secara bersama-sama, masing-masing pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap jumlah penduduk, besaran belanja modal serta nilai indeks kemahalan konstruksi di daerahnya masing-masing.

B. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwasanya penelitian ini memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan koreksi bagi peneliti selanjutnya agar hasil yang diperoleh menjadi lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan hasil pengujian statistik yang diperoleh belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan ketersediaan data laporan penerimaan PBB-P2, dimana tidak semua daerah memberikan laporan penerimaan PBB-P2 setelah pelaksanaan pengalihan pengelolaan PBB-P2. Tidak adanya kewajiban memberikan laporan penerimaan pajak daerah secara rinci serta tidak samanya format pelaporan realisasi APBD menyebabkan tidak semua daerah memberikan laporan berapa jumlah penerimaan PBB-P2 daerahnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 ini hanya mempertimbangkan tiga faktor yang dipilih dengan alasan dan beberapa pertimbangan tertentu sehingga terdapat kemungkinan beberapa faktor lain belum teramati, yaitu sebesar 1,4% variabel lain yang tidak dapat diterangkan dalam penelitian ini.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dapat diberikan beberapa saran kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan permasalahan penerimaan PBB-P2, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap para pembuat kebijakan di pemerintah daerah, jumlah dan kondisi penduduk di daerahnya diharapkan mendapatkan perhatian lebih mengingat faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2.
2. Terhadap para pembuat kebijakan di pemerintah daerah, seberapa besar pemerintah merealisasikan belanja modalnya diharapkan mendapatkan perhatian

lebih mengingat faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan alokasi atau porsi yang lebih besar terhadap belanja modal di dalam anggaran belanjanya, karena penambahan belanja modal memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan penerimaan PBB-P2. Terhadap para pembuat kebijakan di pemerintah pusat, diharapkan memberikan dorongan dan perhatian yang lebih kepada pemerintah daerah di dalam mengelola kebijakannya baik yang terkait dengan pemeliharaan penduduk maupun kebijakan penganggaran belanja.

3. Terhadap para pembuat kebijakan di pemerintahan daerah maupun pusat agar memberikan perhatian lebih dalam penyusunan nilai indeks kemahalan konstruksi dikarenakan nilai ini memiliki pengaruh terhadap penerimaan PBB-P2.

Atas beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penambahan atau perluasan objek penelitian dan rentang waktu penelitian. Jika ketersediaan data dapat dipastikan, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah dan memperluas daerah objek penelitian dan rentang waktu penelitian. sehingga informasi yang dikumpulkan lebih beragam dan simpulan yang diambil dapat digeneralisir.
2. Menambah penggunaan metode penelitian kualitatif, seperti hasil wawancara dan observasi, untuk melengkapi metode kuantitatif. Melalui penambahan metode diharapkan informasi dan simpulan yang diperoleh menjadi lebih memadai dan komprehensif. Kepada peneliti selanjutnya campuran antar dua metode penelitian ini, yaitu kuantitatif dan kualitatif, dimungkinkan untuk dilaksanakan.
3. Saran terakhir dalam penelitian ini yang dapat penulis kemukakan kepada peneliti selanjutnya adalah penambahan variabel lain yang kemungkinan dapat memengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dari penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 variabel bebas. Salah satu variabel lain yang mungkin bisa diuji untuk membantu memprediksi variabel dependen adalah kualitas petugas di dinas pendapatan daerah yang turut serta secara langsung dalam proses pengelolaan penerimaan PBB-P2.